

NAMA PROYEK

SIPAUMAT

(Inisiasi Peningkatan Layanan untuk Inklusi Masyarakat Adat)

LATAR BELAKANG

Masyarakat adat Mentawai merupakan kelompok etnis minoritas di Provinsi Sumatera Barat yang kerap mengalami persoalan eksklusi sosial dan diskriminasi dari kelompok etnis mayoritas Minangkabau. Diskriminasi ini muncul akibat perbedaan adat budaya, kepercayaan, sejarah, serta kondisi geografis Mentawai yang menjadi satu-satunya wilayah berbeda di antara 19 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Stigma sebagai masyarakat yang kolot, bodoh, kotor, eksotis, dan berbagai stigma negatif lainnya masih sering dilekatkan pada masyarakat adat Mentawai. Akibatnya, penerimaan sosial dan pembangunan di wilayah Mentawai tertinggal jauh dibandingkan wilayah lain.

Persoalan eksklusi yang dialami oleh masyarakat adat Mentawai ternyata menyimpan lapisan eksklusi lainnya di dalam komunitas itu sendiri. Di dalam masyarakat adat Mentawai yang bercorak patriarkal, terdapat kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan dan diskriminasi, baik dari pemerintah, kelompok sosial lainnya, maupun dari lingkungan masyarakat adat itu sendiri.

Diskriminasi yang berasal dari lingkungan masyarakat adat lahir dari distorsi terhadap aturan hukum adat dan norma-norma budaya yang berlaku. Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, di mana peran dan posisi perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, psikis, maupun kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial. Perempuan juga mengalami pemiskinan dalam struktur hukum adat karena tidak diberikan hak milik ataupun hak waris atas harta, tanah, dan sumber daya di atasnya. Hal ini menyebabkan perempuan sangat bergantung secara ekonomi kepada laki-laki.

Hukum adat juga belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap anak, terutama anak yatim, karena hak asuh anak diberikan kepada keluarga atau kerabat laki-laki dari pihak ayah. Anak-anak menjadi sangat rentan terhadap kekerasan fisik, penelantaran, bahkan kekerasan seksual. Tingkat kerentanan semakin tinggi dialami oleh perempuan dan anak dengan disabilitas, yang kerap distigmatisasi sebagai kelompok lemah, aib, dan beban bagi keluarga maupun masyarakat.

Dalam struktur sosial adat, perempuan tidak dilibatkan dalam forum-forum pengambilan keputusan, baik di forum adat maupun di ruang publik. Hal ini menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil hanya mengakomodasi kepentingan laki-laki. Hal serupa juga dialami oleh anak-anak dan penyandang disabilitas, yang kebutuhan dan kepentingannya sering kali diatur sepenuhnya oleh orang tua atau orang dewasa. Kepentingan mereka sangat rentan untuk dimanipulasi dan dieksploitasi oleh pihak lain. Anak-anak dan penyandang disabilitas juga kerap dipandang sebagai kelompok yang tidak tahu dan tidak mampu berbuat apa-apa.

Penguatan dan pemberdayaan kelompok marginal sangat penting dilakukan untuk mencapai kesetaraan dengan kelompok sosial lainnya, baik melalui penguatan kapasitas, pembukaan akses layanan dan partisipasi, maupun dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas keikutsertaan mereka dalam forum adat, ruang publik, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan budaya menjadi kunci penting dalam membuka

jalan menuju kesetaraan dan menghapus ketidakadilan serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di Mentawai.

TUJUAN

Program SIPAUMAT bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat Mentawai, termasuk kelompok marginal (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas).

WILAYAH KERJA

Program SIPAUMAT dilaksanakan di:

- Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara
- Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan
- Desa Nemnem Leleu, Kecamatan Sipora Selatan
- Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

FOKUS KAMI

Menumbuhkan dan merawat perspektif GEDSI pada aparaturnya pemerintah desa dan daerah agar lebih fasilitatif dan akomodatif terhadap pelibatan kelompok marginal dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Memperkuat kapasitas masyarakat adat dan kelompok marginal yang mengalami eksklusi sosial agar mampu menjadi aktor perubahan yang memperjuangkan hak-hak sosial dan akses terhadap layanan pemerintah.

Melakukan pengorganisasian, penguatan kesadaran GEDSI, fasilitasi partisipasi, peningkatan kapasitas, serta pelibatan aktif kelompok marginal dalam mengakses layanan dasar, bantuan sosial, perencanaan pembangunan, proses kebijakan, dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Mendorong kemandirian ekonomi bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

Menjalin kolaborasi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil (NGO) dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta dalam upaya perlindungan korban.

MITRA KERJA

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Pemerintah Desa Malancan
- Pemerintah Desa Muntei
- Pemerintah Desa Nemnem Leleu
- LBH Padang
- WCC Nurani Perempuan
- PBHI Sumatera Barat
- FORMMA (Forum Mahasiswa Mentawai) Sumatera Barat
- FORMASI (Forum Masyarakat Sipil) Mentawai

ANGGARAN

IDR 2.643.317.500

DURASI PROGRAM

Fase I: 2022 – 2025

DOKUMEN TERKAIT